**Pengelolaan Sampah Dan Permasalahannya**

**Di Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau**

## Junaidi a,\*, Anna Juliartib,\*, Ervayenri c,\*

Prodi Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana

Universitas Lancang Kuning, Indonesia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ABSTRACT** |  | **ARTICLE HISTORY** |
| Good waste management is an important parameter for the success of a region in becoming an environmentally friendly district/city. Waste management has an important impact on economic, ecological and social aspects. The aim of this research was analyzed the current condition of waste handling and its problems in Pelalawan, Riau. The research method was used the survey method. The data were used primary and secondary data. The results of the research showed that the problems with waste management in Pelalawan are: limited facilities for collecting and transporting waste, the location of open dumping sites, and inadequate waste management. The potential for waste generation in Pelalawan district in 2021 is 183.87 tonnes/day. Currently, waste services in Pelalawan Regency can only be served by 40% of the total of 12 sub-district areas in Pelalawan. Future waste management will be handled by collecting waste levies, waste management plans per cluster, and the formation of a UPTD (Department Technical Implementation Unit) in each service cluster. |  | Received 29 Oktober 2023 Revised 30 Oktober 2023 Accepted 31 Oktober 2023 |
| **KEYWORDS** |
| TPA, Open dumping, UPTD, Waste |

# Pendahuluan

Penanganan sampah kota dan kabupaten merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sangat penting untuk segera diselesaikan bagi pemerintah daerah (Fadzoli *et al*. 2023; Situmeang *et al.* 2023; Martin *et al*. 2023). Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitasnya mengakibatkan peningkatan jumlah sampah disertai permasalahannya (Ta Jana *et al*. 2022; Tampuyak *et al.* 2016; Hakim 2019). Permasalahan sampah bukan lagi sekedar masalah kebersihan dan lingkungan saja, tetapi sudah menjadi masalah sosial. Hampir seluruh kota di Indonesia, belum memiliki penanganan sampah yang baik. Pengelolaan sampah di kota-kota di Indonesia menggunakan metode yang sama, yaitu metode “kumpul-angkut-buang” (Haerani et al. 2019; Prihatin 2020).

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau, memiliki luas wilayah 12.614,78 km2 dan berpenduduk sebanyak 438.788 jiwa (BPS 2017). Kabupaten Pelalawan dengan ibukota Pangkalan Kerinci, terdiri dari 12 kecamatan. Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Pelalawan setiap tahun, menyebabkan peningkatan penyediaan infrastruktur perkotaan termasuk sarana dan prasarana persampahan. Permasalahan penanganan sampah berdampak kepada masyarakat dalm aspek ekonomi, ekologi dan sosial. Secara ekonomi bahwa sampah dapat menjadi rezeki bagi sebahagian orang dengan memanfaatkan sampah yang dapat didaur ulang atau pembuatan kompos. Secara ekologi bahwa sampah menimbulkan dampak bagi lingkungan. Lingkungan menjadi kotor, bau dan menjadi sumber penyakit. Secara sosial bahwa penanganan sampah yang buruk dapat mengakibatkan masyarakat saling berantem dan bermusuhan.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi penanganan sampah di Kabupaten Pelalawan perlu penanganan secara komprehensif dalam jangka waktu panjang. Pemerintah Daerah Pelalawan perlu melakukan perencanaan yang matang dan memadai baik aspek teknik, secara prasarana maupun manajemen. Rencana induk persampahan diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi pelaku pembangunan bidang persampahan dalam meningkatkan pengelolaan persampahan untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Oleh karena itu pekerjaan penyusunan rencana induk pengelolaan sampah Kabupaten Pelalawan ini perlu supaya menjadi pegangan dan acuan bagi perencana ke tahap pekerjaan selanjutnya dan bermanfaat secara optimal oleh semua pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*). Atas dasar latar belakang di atas perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk kondisi terkini penanganan sampah dan permasalahannya di Pelalawan, Riau.

# Metode Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan di Kabupaten Pelalawan selama 2 bulan, yaitu April - Juni 2022. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data primer dan sekunder di Pemda Pelalawan, BPS (Badan Pusat Statistik), kecamatan di Pelalawan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pelalawan (DLHK Pelalawan). Alat yang diperlukan berupa alat tulis, kamera, dan laptop.

Metode dalam penelitian ini adalah metode survey. Untuk metodologi survey yang dilakukan di lapangan dengan pengkajian wilayah studi, demografi dan ketatakotaan, pengkajian biaya, sumber pendanaan dan keuangan. Data yang diambil adalah data primer berupa wawancara langsung dengan pengelola yang mempunyai kewenangan di lembaga/instansi. Data sekunder dengan menelusuri liteartur, buku, teksbook dan jurnal. Sumber buku berasal dari laporan kegiatan yang dilakukan oleh Pemda Pelalawan dan DLHK Pelalawan Periode perencanaan kegiatan tahun 2021-2041. Kriteria penyususna rencana induk meliputi kriteria teknis dan kriteria standar pelayanan minimal.

**Survey dan Pengkajian Wilayah Studi**

Data yang harus dikumpulkan yaitu seperti:

1. Data kondisi wilayah studi dan wilayah pelayanan
2. Data penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan,
   1. Data timbulan sampah (liter/orang/hari, m3/hari atau ton/hari), serta komposisi dan karakteristik sampah, meliputi komposisi organik, kertas, plastik, logam, kaca dan lain-lain. Untuk data karakteristik sampah perlu diketahui berat jenis sampah, kadar air, nilai kalor dan lain-lain;
   2. Pola penanganan sampah dari sumber sampai TPA, untuk mengetahui aliran sampah dari setiap sumber sampah yang ke TPS, TPS 3R, SPA, fPSA, TPST dan TPA (atau bahkan ke TPA liar);
   3. Pewadahan (jenis wadah yang umum digunakan);
   4. Pengumpulan (metode pengumpulan baik komunal maupun individual, sarana yang digunakan, jumlah sarana pengumpulan dan lain-lain);
   5. Pemindahan skala kawasan (metode pemindahan baik TPS, container, TPS 3R, jumlah prasarana pemindahan, lokasi dan lain-lain) dan skala kota (fPSA atau SPA, jumlah dan lokasi SPA/fPSA);
   6. 3R skala kawasan (lokasi, jumlah, metode 3R dan kondisi operasi, jumlah pengurangan/pemanfaatan sampah dan lain-lain) dan 3R skala kota (lokasi, jumlah pengurangan/pemanfaatan sampah, fasilitas dan kondisi operasi dan lain-lain);
   7. Pengangkutan (jumlah dan jenis kendaraan angkut, frekuensi atau ritasi pengangkutan, rute angkutan, dan lain-lain);
   8. Pemrosesan akhir (lokasi, luas, fasilitas TPA/TPST, kondisi operasi dan pemanfaatan lahan).
3. Data Kependudukan
4. Data Sosial Ekonomi
5. Data Kelembagaan
6. Data Peraturan
7. Data Peran Serta Masyarakat
8. Peta wilayah, sebaran penduduk, geologi, hidrologi dengan ukuran skala sesuai ketentuan yang berlaku.

**Survey dan Pengkajian Demografi dan Ketatakotaan**

Survei dan pengkajian demografi adalah:

1. Wilayah sasaran survei harus dikelompokan ke dalam kategori wilayah berdasarkan jumlah penduduk.
2. Cari data jumlah penduduk awal perencanaan
3. Tentukan nilai persentase pertambahan penduduk per tahun
4. Hitung pertambahan nilai penduduk sampai akhir tahun perencanaan

**Survey dan Pengkajian Biaya, Sumber Pendanaan dan Keuangan**

Data lapangan yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Perolehan Data Eksisting Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dan Data Statistik;
2. Perolehan Data Pelanggan;
3. Perolehan Data Penagihan Retribusi
4. Perolehan Data Timbulan Sampah;
5. Perolehan Data Personil;
6. Perolehan Data Laporan Keuangan;
7. Perolehan Data Kemampuan Sumber Pendanaan Daerah;
8. Perolehan Data Kemampuan masyarakat;
9. Perolehan Data Peluang Adanya KPS; dan
10. Perolehan Data Alternatif Sumber Pembiayaan.

# Pembahasan

**Demogarafi Kabupaten Pelalawan**

Wilayah Kabupaten Pelawan secara administrasi pemerintahan terbagi atas 12 (dua belas) kecamatan, yang terbagi menjadi 104 desa dan 14 kelurahan. Jumlah total desa dan kelurahan di Kabupaten Pelalawan adalah 118 desa/kelurahan.

Luas wilayah Kabupaten Pelalawan kurang lebih 1.392.494 ha atau 14,73 % dari luas wilayah Provinsi Riau (9.456.160 Ha). Kabupaten terdiri dari 12 Kecamatan dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30,45%) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan. Ibukota dari Kabupaten Pelalawan adalah Pangkalan Kerinci. Jarak antara Kota Pekanbaru ke Kabupaten Pelalawan adalah 60 km dan 1 jam perjalanan.

**Analisis kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Pelalawan**

Permasalahan yang sering muncul pada penanganan pengelolaan sampah di Kabupaten Pekanbaru terdiri dari sub sistem pengaturan, kelembagaan, keuangan, peran serta masyarakat dan perguruan tinggi serta teknis teknologis. Selain itu, permasalahan dan kebutuhan pengelolaan sampah yang terdiri dari tingkat dan cakupan pelayanan, kinerja PSP (Plastik Sekali Pakai), potensi peningkatan cakupan, PSP yang belum dimanfaatkan dan kinerja kelembagaan.

Permasalahan pada sub sistem pengaturan meliputi kelengkapan materi peraturan daerah. Beberapa kondisi yang berkaitan dengan aspek hukum dan peraturan adalah: peraturan daerah (Perda) yang terkait dengan institusi pengelolan kebersihan dan persampahan; tanggung jawab, hak dan kewajiban pemerintah daerah, desa dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Selanjutnya Perda yang terkait dengan larangan dan sanksi dan retribusi daerah.

Permasalahan yang muncul pada sub kelembagaan adalah wilayah pelayanan yang cukup luas, pola permukiman yang tidak kompak, pemukiman yang berada atau diapit dengan wilayah perkebunan. Hal ini menyulitkan distribusi pelayanan persampahan secara merata di Kabupaten Pelalawan. Harapan penyelesaian masalah ini adalah adanya pembentukan UPTD pada kluster prioritas dan LPS (Lembaga Pengelolaan Sampah) yang berada di setiap kecamatan. Lembaga pengelolaan sampah ini bisa berasal dari pengelola bank sampah sebelumnya atau yang sudah ada namunn diberi pembekalan dan pelatihan di setiap lokasi TPST. Terobosan lain yang bisa dilakukan adalah pemberdayaan pemulung, yakni memberi pelatihan untuk kegiatan di TPST yang menerapkan teknologi pemilahan mesin dan manusia yakni Conveyor.

Permasalahan pada sub sistem keuangan adalah peningkatan kebutuhan anggaran pengelolaan sampah pada tahun 2020 sebesar Rp. 10.776.031.120. Dengan besarnya biaya pengelolaan persampahan tersebut maka diperlukan inovasi pemasukan anggaran, selain mengandalkan APBD Kabupaten Pelalawan. Pengelolaan sampah di Kabupaten Pelalawan berpotensi menghasilkan tambahan pemasukan dana melalui retribusi sistem pengangkutan dan kegiatan pengomposan sampah. Jika ini terlaksana dengan baik, maka dapat dihitung potensi investasi dari kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Pelalawan.

Kontribusi pengelolaan sampah dari sub sistem peran serta masyarakat/ swasta/ perguruan tinggi sangat dibutuhkan. Hal ini penting untuk memberikan gambaran tentang kesiapan masyarakat terlibat dalam program pengurangan sampah yang diselenggarakan oleh dinas terkait. Kondisi peran serta masyarakat di Kabupaten Pelalawan dapat diamati dari perilaku sehari-hari masyarakat, apakah cukup responsif pada keadaan lingkungan sekitar terutama pada isu sampah liar dan juga responsif dengan lingkungan perumahan sendiri.

Pada beberapa kasus yang terjadi di ibukota Kabupaten Pelalawan, khususnya pada kawasan perumahan kota, bahwa ada kecenderungan kebiasaan membuang sampah secara liar. Perilaku seperti ini mencerminkan lemahnya keterlibatan masyarakat dan juga instansi terkait dalam menjangkau kebutuhan pelayanan persampahan pada satuan unit permukiman yang cenderung terisolir dan juga sebagai kawasan kumuh.

Permasalahan yang muncul pada sub sistem teknis teknologis meliputi pewadahan dan pengumpulan; pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Semua permasalahan yang muncul pada semua sub-sub sistem harus dapat diselesaikan dengan segera.

**Kebijakan, strategi dan rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah**

Kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan sampah, dimana memiliki visi yakni penyelenggaraan pelayanan pengelolaan sampah, sarana dan prasarana persampahan kabupaten pelalawan. Misi dari kebijakan dan strategi pengembangan system pengelolaan sampah yakni penyelenggaraan pelayanan perampahan secara menyeluruh dalam kluster prioritas.

Beberapa permasalahan yang timbul dalam implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :

Dalam pengelolaan sampah Kabupaten Pelalawan dihadapkan pada sejumlah isu terkait aspek non teknis.

1. Pendanaan untuk sektor persampahan timpang jika dibandingkan dengan sektor yang lain.
2. Semakin maraknya pembuangan sampah secara ilegal, khususnya di kawasan perkotaan.
3. Belum optimal sistem retribusi sampah yang lebih memudahkan penghitungan dan pemungutan retribusinya pada warga.
4. Belum optimal dukungan pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat, termasuk keberlanjutan kelompok-kelompok pengelola mandiri (3R) yang sudah terbentuk dan berjalan.
5. Kurangnya kampanye untuk pengurangan sampah dari sumbernya, khususnya reduksi sampah plastik.
6. Kurang optimal penegakan hukum/peraturan untuk pelanggaran di bidang persampahan, baik pelanggar perorangan maupun badan usaha/institusi.
7. Kurangnya dukungan pada pengurangan sampah sektor informal seperti pemilah mandiri dan pelapak.

Sedangkan Isu strategis pada aspek teknis pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, Kabupaten Pelalawan adalah:

1. Cakupan layanan persampahan saat ini masih rendah.
2. Kurangnya Inovasi Kegiatan Daur Ulang Sampah (LDUS).
3. Keterbatasan daya tampung TPA Kemang di Kecamatan Pangkalan Kerinci.
4. Belum adanya tempat pengolahan sampah terpadu yang dikelola oleh pemerintah daerah.
5. Masih kurangnya TPS3R

# Kesimpulan

Kondisi dan permasalahan yang muncul dari pengelolaan sampah di Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut: Pendanaan yang kurang memadai; pembuangan sampah secara ilegal; belum optimalnya sistem retribusi sampah; kurangnya dukungan oleh masyarakat, kelompok-kelompok pengelola mandiri (3R); Kurangnya kampanye untuk pengurangan sampah dari sumbernya, khususnya reduksi sampah plastik; kurangnya penegakan hukum/peraturan untuk pelanggaran di bidang persampahan; dan kurangnya dukungan pada pengurangan sampah sektor informal seperti pemilah mandiri dan pelapak.

Harapan penyelesaian masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Pelalawan ini adalah pembentukan UPTD pada kluster prioritas dan LPS (Lembaga Pengelolaan Sampah) yang berada di setiap kecamatan. Lembaga pengelolaan sampah ini bisa berasal dari pengelola bank sampah sebelumnya atau yang sudah ada namunn diberi pembekalan dan pelatihan di setiap lokasi TPST. Terobosan lain yang bisa dilakukan adalah pemberdayaan pemulung, yakni memberi pelatihan untuk kegiatan di TPST yang menerapkan teknologi pemilahan mesin dan manusia yakni *Conveyor*.

**Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulisan ini, terutama pihak bank Sampah Unilak.

**Daftar Pustaka**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang* Wilayah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019-2039. Riau: Pelalawan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pelalawan. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2021.* Riau: Pelalawan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pelalawan. *Ringkasan APBD Pelalawan Tahun 2019 dan Tahun 2020. Lampiran 1.* Riau: Pelalawan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pelalawan. *Strategi Sanitasi Kabupaten Kabupaten Pelalawan Tahun 2017.* Riau: Pelalawan.

Fadzoli, T., Subekti, R., dan Waluyo. 2023. Dampak kebijakan pengelolaan sampah sebagai parameter kinerja pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara.*  1(3): 28-36

Hakim, MZ. 2019. Pengelolaan dan pengendalian sampah plastik berwawasan lingkungan. Jurnal Amanna Gappa. 27(2): 111-121.

Haerani, D., Syafrudin., dan Sasongko, SB. 2019. Pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya. *Proceeding Biology Education Confrence.* 16(1): 266-274

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019-2039.* Riau: Pelalawan

Martin, Harafh, LOM., dan Yunus, L. 2023. Analisis sistem pengelolaan sampah di kota Raha Kabupaten Muna. *Jurnal Perencanaan Wilayah*. 8(1): 56-68

Prihatin, RB. 2020. Pengelolaan sampah di kota bertipe sedang: studi kasus di Kota Cirebon dan Kota Surabaya. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial.* 11(1):1-16

Situmeang, TL., Siumanjuntak, L., Daulay, RF., dan Ivanna, J. 2023. Implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap penanggulangan sampah (studi kasus jl RS Haji Percut Sei Tuan, Desa Medan Estate). *Jurnal Multi Disiplin Dehasen (Mude).* 2(3): 321-328.

Ta Jana, SS., Andini, IN., Setiani, E., dan Pratiwi, PC. 2022. Pemanfaatan limbah plastik menjadi kerajinan tangan di Desa Sukadamai, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas.* 26(1): 41-47.

Tampuyak, S., Anwar, C., dan Sangadji, N. 2016. Analisis proyeksi pertumbuhan penduduk dan kebutuhan fasilitas persampahan di kota Palu 2015-2025. *Jurnal Katalogis*. 4(4): 94-104.